BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Berbagai masalah yang berakibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan muculnya berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Menyikapi berbagai dari permasalahan itu pemerintah Kabupaten Purwakarta berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Kabupaten Purwakarta yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan yaitu dengan adanya KTP *Online* sebagai kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Proses perumusan masalah kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan mengumpulkan asumsi-asumsi dari masyarakat ataupun aparatur pemerintahan. Adapun peran *stakeholder* dalam perumusan masalah kebijakan yaitu sebagai perumus sekaligus sebagai pengambil keputusan. *Stakeholder* tersebut yang diantaranya aparatur pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan tokoh masyarakat / LSM.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran KTP *Online* sebagai suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai admin. Dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa / kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan serta dapat menghemat waktu dalam pembuatan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dikenal dengan KTP *Online*. KTP *Online* adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. KTP *Online* itu sendiri telah menjadi suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah.

Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan KTP *Online* sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana

masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.

Berbagai evaluasi terhadap kebijakan KTP *Online* ini pemerintah merasa kebijakan ini cukup bisa membantu pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan KTP *Online* tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Dengan adanya pengelolaan data secara *online* yang bersifat intern di kantor Desa-desa maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. KTP *Online* sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Adapun hasil dari perumusan masalah kebijakan yaitu adanya kebijakan pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta dapat menjadi suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan beberapa kendala di dalamnya, seperti adanya jaringan yang rusak dan tidak adanya petugas yang menguasai bidang *IT*. Hal ini tidak lepas dari berbagai macam motivasi atau suatu penghargaan oleh masyarakat terhadap pemerintah agar lebih baik dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purwakarta berusaha dalam pelayanan KTP

Online ini agar sesuai dengan tujuan. Adapun Perumusan Masalah Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :

4.1.1 Analisis Batas dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Penerapan dari keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya dengan masyarakat sebagai objeknya. Kebijakan yang terbilang baru oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam bidang kependudukan dan ditujukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dalam menata KTP *Online* sebagai kebijakan utama, sehingga tercapai ketertiban pada administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Proses analisis batas pada perumusan masalah kebijakan dengan memperkirakan masalah individual yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan pada perumusan masalah kebijakan. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta dengan mengatisipasi masalah yang akan timbul pada tanggapan masyarakat yang tidak mungkin semuanya dapat menerima KTP *Online* sebagai hasil kebijakan dapat merasakan hal positif.

Mengenai analisis batas pada perumusan masalah kebijakan, pemerintah Kabupaten Purwakarta dihadapi masalah yang sama yaitu dengan adanya daerah-

daerah yang terpencil sehingga sering adanya gangguan pada jaringan *Internet*. Hal ini juga memperhatikan beberapa hal penting untuk mempermudah dalam proses pembuatan KTP *Online* secara *Intern* yang berada di Desa-desa dan hanya di wilayah Kabupaten Purwakarta, yaitu kelengkapan sarana seperti komputer, *sofware* yang dapat membantu dalam proses pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Hal yang dilakukan dalam analisis batas dengan mengumpulkan informasi tentang kelemahan jika adanya jaringan yang rusak atau masalah yang dapat menghambat berjalannya proses pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu masalah-masalah pada pelaksanaan di lapangan dapat diatasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah tersebut mengatur semua urusan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat penceraian pernikahan, surat hak asuh anak.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi masalah pada KTP *Online* yaitu dapat menyediakan untuk mengantisipasi sarana dan prasarana

(komputer serta jaringan rusak dapat diperbaiki segera) yang terkait dengan pembuatan KTP *Online* secara *Intern*, serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dengan memperhatikan kelengkapan-kelengkapan KTP *Online* sebagai Kebijakan utama Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakrta. Meskipun pemahaman tentang KTP *Online* tidak semua masyarakat memahami kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggapan dari masyarakat tentang kebijakan KTP *Online* ini sangatlah positif. Hal ini dikarenakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan pendaftaran KTP, serta pelayanan yang dilakukan para petugas Desa setempat yang selalu berjalan dengan baik.

4.1.2 Analisis Klasifikasi dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Adanya kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yaitu dengan beberapa pertimbangan dengan memperhatikan kondisi ketika berjalannya proses pembuatan KTP *Online* di Desa-desa Kabupaten Purwakarta. Kondisi dilapangan pada awalnya berjalan tidak sesuai tujuan, hal ini dikarenakan masih adanya petugas Desa yang belum menguasai *ICT* sebagai syarat utama menjalankan proses pembuatan KTP *Onine*.

Masalah-masalah yang ada pada perumusan masalah kebijakan dapat diatasi pada proses perumusan masalah kebijakan yang di antaranya dengan mengklasifikasikan masalah-masalah atau dengan cara membedakan masalah yang ada, seperti masalah fisik yang diantaranya pada sarana dan prasarana,

komputer, penyediaan alat yang lebih canggih. Adapun masalah non fisik sepeti kurangnya pemahaman petugas desa yang belum menguasai bidang *IT* sebelumnya. Selain itu dengan mengkodisikan hal yang perlu ada pada hasil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitment para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Mendefinisikan permasalahan yang ada dalam KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta dengan mencari kekurangan-kekurangan yang ada di Desa-desa wilayah Kabupaten Purwakarta. Hal ini membantu mengatasi semua urusan permasalahan kondisi dilapangan, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu melakukan pengecekan yang sesuai dengan prosedur yang sudah di tentukan.

Hasil dari analisis klasifikasi pada perumusan kebijakan dalam analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yaitu untuk memperjelas konsep-konsep permasalahan yang akan timbul setelah keputusan kebijakan KTP *Online.* Serta mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan dalam proses pembuatan KTP *Online*. Tahap klasifikasi pada permasalahan selalu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu dengan mencari apa yang menjadi kendala pada kondisi proses pembuatan KTP *Online.* Beberapa langkah telah dilakukan dengan

melibatkan semua aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan aparatur yang bersangkutan dengan KTP *Online* agar adanya kerjasama antar instansi pemerintahan. Pada kondisi dilapangan masyarakatpun menerima dengan baik atas adanya kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta mempunyai pandangan secara jelas bahwa dalam berorganisasi harus dibentuk dengan baik dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak. Kondisi di lapangan yang sangat diperhatikan pada saat analisis batas dalam perumusan masalah oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu pada kebijakan KTP *Online* telah timbul masalah yang telah diperkirakan sebelumnya yaitu seperti masalah pada kondisi daerah terpencil yang berpengaruh pada jaringan internet. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pada daerah terpencil dengan melengkapi alat-alat *IT* yang lebih canggih seperti komputer yang bisa menyimpan data lebih banyak, jaringan internet yang bagus, sofware yang keluaran terbaru sehingga dapat mengatasi masalah tersebut pada penerapan KTP *Online*.

4.1.3 Analisis Hirarki dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Mengidentifikasi sebab-sebab yang telah dilakukan pada KTP *Online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencari beberapa penyebab pada KTP *Online.* Kebijakan utama sebagai salah satu program utama dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta dalam pendaftaran kependudukan. Hal ini telah dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Pada proses analisis hirarki dalam peumusan masalah untuk pengambilan keputusan kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta selalu memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, keadaan daerah, ketersediaan perangkat desa dalam penguasaan bidang *IT*. Karena menyebabkan sukses atau tidaknya seperti, adanya gangguan pada pelaksanaan KTP *Online* yang. Hal ini telah dimiliki setiap Desa-desa karena perangkat tersebut menjadi sangat vital dalam penerapan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Untuk menghilangkan pada sistem manual, telah diciptakan sistem mekanik yang melibatkan para pegawai untuk melayani masyarakat dengan baik yaitu KTP *Online* secara *intern* di Desa-desa. Jumlah data yang dimasukkan lebih banyak daripada yang dapat dilakukan oleh sistem manual.

Alasan yang menyebabkan adanya Kebijakan KTP *Online* oleh Pemerintah Kbupaten Purwakarta yaitu fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat dari

jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran (masyarakat) dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka agar menjadi suatu pelayanan yang baik. Hal ini telah dibuktikan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil melakukan proses pembuatan pendaftaran kependudukan melalui KTP *Online*. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih mudah dan cepat dalam pendaftaran identitas kependudukan, KTP *Online* bertujuannya memproses data secara efisien, mengontrol proses data, dan memperbaharui basis data di setiap instansi dilingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Mengidentifikasi sebab-sebab menjadi jelas bahwa sasaran yang dicapai dalam pembuatan KTP *Online* oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, yaitu terbentuknya yang sesuai dengan kebutuhan kecepatan waktu dalam proses pembuatan KTP pada setiap Desa-desa di Kabupaten Purwakarta.

Hasil dari analisis hirarki pada perumusan masalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta terlebih dahulu mencari penyebab yang dapat mengganggu pada KTP *Online* sebagai kebijakan utama dan sebagai salah satu program utama dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Hal ini sangat membantu pada berjalannya kebijakan KTP *Online* dalam melayani masyarakat dengan baik sebagai inovasi yang baru dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun penyebab dari masalah tersebut yaitu, adanya identitas penduduk yang sama (ganda) sehingga menyulitkan pendataan kependudukan dalam melaksanakan administrasi

kependudukan yang dilaksanakan oleh dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

4.1.4 *Synecties* dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Kemajuan dibidang teknologi komputer dan teknologi informasi saat ini telah sungguh-sungguh dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membawa kemanfaatan yang luar biasa dalam menghadirkan informasi dan memberikan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan *ICT* sebagai suatu sistem dan proses kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih lentur dan responsif untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Proses *Synecties* pada Perumusan masalah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memperbaiki kebijakan untuk menjadi kebijakan yang baik terhadap masyarakat. semua hambatan yang ada dalam proses *synecties* yaitu hambatan adanya alat dalam proses pembuatan KTP *Online* yang rusak seperti komputer sebagai hal yang sangat penting. Masalah tersebut dapat diperbaiki dengan cara menyediakan komputer cadangan sebagai antisipasi sebelum komputer yang utama rusak ketika dipakai dalam pembuatan KTP *Online*.

Hasil *Synecties* pada perumusan masalah kebijakan pemerintah Kabupaten purwakarta pada kebijakan pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Dengan lebih mengenali masalah-masalah pada KTP *Online* sebagai keputusan kebijakan dalam mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah membuktikan bahwa kemajuan *ICT* di Kabupaten Purwakarta sangat berkembang pesat dengan adanya pendaftaran kependudukan KTP *Online* secara *intern* yang dilaksanakan di Desa-desa wilayah Kabupaten Purwakarta.

Lebih mengenali hasil *synecties* dalam perumusan masalah kebijakan di atas peneliti memperhatikan hal-hal yang bersifat mengatasi masalah dalam KTP *Online*. Bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat tanggap dalam mengatasi masalah yang ada seperti kurangnya alat pendukung dalam pembuatan KTP *Online* dengan memenuhi sarana dan prasarana yaitu komputer, adanya internet, pemahaman bidang IT oleh setiap petugas desa yang berkaitan dengan KTP *Online.*

Synecties teknik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan mengenali masalah-masalah serta memperhatikan kondisi langsung pada proses pembuatan KTP *Online*. Mengenali masalah-masalah yang berdasarkan kondisi di lapangan, seperti masalah yang bersifat pemahaman, yaitu pemahaman pada aparatur pemerintahan dalam penerapan kebijakan KTP *Online,* serta pemahaman masyarakat tentang adanya kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut berlaku pada semua Desa-desa atas pemahaman yang terdapat dalam KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Perumusan masalah yang lebih mengenali masalah-

masalah yang bersifat analog pada KTP *Online* sebagai kebijakan utama dalam mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Adapun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengetahui permasalahan seperti, pemahaman pada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan KTP *Online*, serta pemahaman aparatur dalam proses pelayanan pembuatan KTP *Online* secara *Intern* terhadap masyarakat.

4.1.5 *Brainstorming* dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Brainstorming tenik yang telah menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mengidentifikasi masalah. Sebuah kebijakan publik telah menguntungkan atau memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta dan menekan resiko seminimal mungkin. Serta menggunakan dan menghasilkan ide-ide dari para pembuat kebijakan dalam perumusan masalah dan tujuan yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang.

Proses *Brainstorming* pada perumusan masalah kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan mengukur tingkat efektifitas berupa dampak / efeknya pada sasaran serta efisiensinya kebijakan KTP *Online* sebagai kebijakan

yang utama dalam memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Dalam perkembangannya, aspek yang dievaluasi perumusan kebijakan pada *Brainstorming* yang memperhatikan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input),* keluaran *(output)* dan hasil *(outcome).*

Brainstorming pada perumusan masalah kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu pelaksanaan kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mengidentifikasi masalah. Masalah-masalah yang pada brain storming yaitu adanya perbedaan ide-ide pada setiap stakeholder yang ada pada perumusan masalah kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Kemudian pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mencoba situasi untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Meski telah membahas upaya-upaya untuk mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan KTP *Online* yang baik yang baik, selain itu adanya tujuan diantaranya adalah untuk menjelaskan mengapa pelaksanaan terjadi pada pelayanan kependudukan yang lebih efisien serta tidak menggunakan sistem manual lagi. Dengan latar hasil *brainstorming* tersebut, dapat memahami dan mengetahui lebih baik adanya jalan keluar seperti, mengatasi hambatan yang ada dalam kerusakan jaringan dengan mencari penyebab jaringan tersebut terganggu. Mempermudah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan sebelumnya seperti, adanya keterlambatan dalam pelayanan pendaftaran KTP karena adanya aparatur atau petugas desa yang sakit. Hal ini dapat diatasi dengan cara tidak hanya satu orang

saja yang menguasai *IT* yaitu dengan menyediakan dua orang bahkan lebih yang menguasai *IT* di Desa-desa Kabupaten Purwakarta.

4.1.6 Analisis perspektif berganda dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Analisis perspektif berganda pada perumusan masalah kebijakan yang mencari pandangan dari masyakarat ataupun aparatur yang mengikuti pada perunmusan masalah kebijakan. Hal ini lebih banyak mengenai kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta terhadap masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis. Perumusan masalah yang menggunakan metode dimana untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai pada KTP *Online* sebagai kebijakan utama dalam mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Hal ini telah dapat mengetahui permasalahan dari pandangan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Dijelaskan seperti halnya juga di dalam KTP *Online* tersebut pada proses Perumusan masalah terhadap sistem tersebut terus dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta yakni mulai dari sistemnya maupun kebijakannya. Seperti dijelaskan diatas perumusan masalah dalam kebijakan pada KTP *Online* Kabupaten Purwakarta yang dilakukan, dengan memperhatikan dari letak geografisnya pada daerah-daerah terhadap sistem meliputi jaringan *internet, software,* dan *hardware.*

Analisis perspektif berganda pada perumusan masalah kebijakan menghasilkan pandangan pada kondisi di lapangan seperti adanya masalah pada peluang masyarakat untuk dapat memahami proses pembuatan KTP *Online* yang dilakukan secara *Intern*. Adapun masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis, dapat di atasi secara ilmiahnya yang berdasarkan teori tentang kebijakan pada masyarat, sehingga membantu pelaksaan kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik. Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam mengenali peluang masyarakat pada analisis perspektif tersebut yaitu, pada proses pembuatan identitas kependudukan, yang memperoleh pandangannya dari kondisi di kantor desa dalam pelayanan KTP *Online* sebagai pembuatan pendaftaran kependudukan dengan efisien, serta lebih baik dari pembuatan pendaftaran kependudukan yang menggunakan cara manual.

Menurut uraian di atas, pada tataran dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Analisis perspektif berganda menjadi bagian penting dalam proses pembangunan segala bidang khususnya pada kebijakan KTP *Online* Kabupaten Purwakarta dan harus selalu dilaksanakan dengan baik. Pada tata operasional, sejumlah aspek patut mendapat perhatian dengan baik.

4.1.7 Analisis asumsi dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Analisis asumsi telah bisa mensintesiskan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan. Perumusan masalah yang bertujuan mensintesiskan permasalahan dalam menentukan beberapa langkah pemerintahan Kabupaten Purwakarta secara kreatif pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan. Serta untuk memilih permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Proses analisis asumsi pada perumusan masalah kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu dengan menggabungkan / membandingkan permasalahan yang ada dengan hal-hal yang berkaitan mengenai KTP online sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Adapun kaitan-kaitan ini harus diakui bahwa salah satu kontribusi penting dari analisis pada perumusan masalah ini karena adanya perhatiannya pada teori yang menyeluruh mengenai bagaimana cara mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Adanya hasil dari analisis asumsi yaitu menghasilkan cara kreatif untuk membandingkan asumsi-asumsi atau pendapat yang bertentangan dengan masalah kebijakan tentang KTP *Online*. Hal tersebut seperti adanya sekelompok masyarakat yang belumbisa menerima hadinya kebijakan KTP *Online*, yang dikarenakan belum memahami cara pembuatan atau pendaftaran kependudukan yang dilakukan secara intern di Desa-desa. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat tanggap dalam pendapat-pendapat masyarakat atas hasil dari

adanya kebijakan KTP *Online* yang dilaksanakan. Pada proses analisis asumsi tersebut terdapat banyak anggapan bahwa kebijakan KTP *Online i*ni akan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak akan harapannya dengan pelayanan yang bersifat *instant.*

Sesuai dengan asumsi-asumsi yang berupa tanggapan masyarakat pada kebijakan KTP *Online* yang ada pada perumusan masalah kebijakan. Berbagai cara pun untuk antisipasi menjaga agar data tersebut aman pada proses pembuatan KTP *Online* yang bersifat *intern*, tentunya yang telah menjadi suatu kebijakan pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Hal yang telah dilakukan biasanya dengan menyimpan rapih data tersebut yang dianggap aman dan tidak diketahui orang banyak. Sehingga masyakat dapat merasa nyaman akan adanya hasil dari kebijakan pemerintah atas KTP *Online* yang berjalan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

4.1.8 Pemetaan Argumentasi dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Pemetaan argumentasi telah membantu dalam menggabungkan pendapat-pendapat dengan informasi kebijakan yang sama terhadap KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Serta mencari menghasilkan berbentuk pengetahuan yang bertentangan, serta bisa menguntungkan atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini dilakukan oleh para pembuat kebijakan KTP *Online* Dengan menggabungkan pendapat-

pendapat dengan informasi kebijakan yang sama yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang.

Disamping itu, KTP *Online* setelah menjadi kebijakan utama dalam perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Maka hal yang diperhatikan adalah dalam memasukkan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab terhadap entri data, ini dimaksudkan untuk menjaga keteraturan dalam memasukan data tersebut. Dengan adanya pertanggungjawaban di setiap Desa-desa maka membuat lebih mudah dalam memelihara integritas dan keamanan suatu data *based* yang berkualitas tinggi. KTP *Online* di buat sebagai prosedur standar untuk *entri* data, arsip, dokumtasi. KTP *Online* sebagai tujuan untuk menjamin penanganan yang efisien dari proses pembuatan identitas kependudukan.

Pemetaan argumentasi dalam hal ini tidak ubahnya dengan pemeriksaan karena segala sesuatu di dalam implementasi ataupun sistemnya setiap tahun akan di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Pemetaan argumentasi atas kebijakan tersebut telah dilakukan dan berbagai informasi yang memperbaiki secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali kebijakan dan sistemnya selalu di periksa.

Hasil dari Pemetaan Argumentasi dalam Perumusan masalah pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta dapat menggabungkan pendapat-pendapat negatif maupun positif dengan informasi kebijakan yang sama terhadap KTP *Online*, seperti pendapat yang dapat membuat sebagian masyarakat bisa menerima adanya kebijakan KTP *Online*. Beberapa pendapat yang dapat digabungkan dalam menghasilkan sebuah kepastian, yang pasti sehingga kebijakan KTP *Online* dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hal ini menjadi pengetahuan yang menggunakan informasi dari masyarakat yang memudahkan untuk melaksanakan proses pelaksanaan KTP *Onlin*e oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Adanya informasi yang membantu pengembangan *ICT* di Kabupaten Purwakarta yaitu telah berjalannya dengan baik pada semua Desa-desa di Kabupaten Purwakarta. Beberapa langkah seperti, adanya usaha dalam menghambat kendala-kendala pada kebijakan KTP *Online* yaitu dengan memperbaiki jaringan yang rusak serta menambah alat yang lebih bagus (komputer yang dapat menyimpan data lebih banyak). Sehingga pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat menjadikan kebijakan KTP *Online* sebagai kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta.

4.2 Peramalan Kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Peramalan Kebijakan telah mendapat pencapaian tujuan yang dilakukan Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan KTP *Online* yang efektif, dan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dalam mengembangkan KTP *Online*. seperti teknologi yang canggih

yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru dapat menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak. Untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan pada KTP *Online* yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa, telah tersedianya sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

Proses Peramalan Kebijakan dilakukan dengan memberikan sumbangan ideologi berupa pemikiran dan pendapat pada kebijakan, terutama dari segi metodologi yang diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dari penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi pada KTP *Online*. Hasil-hasil dari penilaian pada Peramalan Kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi para pelaku kebijakan yang lain, serta fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada maka pemerintah Kabupaten Purwakarta yang lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan / kekuranagn tidak terulang pada waktu akan datang.

Analisis kebijakan dengan melakukan langkah-langkah peramalan kebijakan telah menjadi bagian penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terciptanya sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini menjadi penentuan bagi berjalannya sebuah pemerintahan yang baik, dengan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Mungkin telah menjadi kebiasaan bagi semua instansi atau lembaga dalam melakukan sebuah perumusan untuk sebuah kebijakan.

Adapun hasil dari peramalan kebijakan yang terkait dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa peramalan kebijakan pada pembuatan kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik, dan tercapainya tujuan yang ditetapkan, seperti proses pendaftaran kependudukan yang berjalan dengan lancar kantor Desa-desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya masalah jaringan yang dapat menggangu berjalannya pelaksanaan KTP *Online* pada saat ini dapat diatasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai administratornya.

4.2.1 *Proyeksi* dalam Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Pada saat ini dan yang akan datang sepertinya masyarakat telah dihadapkan dan mulai bergeser untuk memilih *ICT* dan meninggalkan interaksi-interaksi tradisional / manual yang banyak sekali menyita waktu, tenaga dan biaya. Tetapi dengan ketersediaan dana dan anggaran sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *ICT* yang akan diterapkan hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentunya harus memiliki kekuatan yang cukup terhadap berbagai sumber daya yang ada dan memiliki kemauan untuk menganggarkannya, serta dapat medukung nberjalannya kebijakan KTP *Online*. Hal ini menjadi suatu yang paling diperhatikan pada proses pembuatan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. *Proyeksi* dilakukan pemerintah Kabupaten

Purwakarta untuk mempersiapkan sesuatu yang dapat diatasi agar angaran untuk pengembangan sistem informasi yang ada dilingkungan Kabupaten Purwakarta tidak di bebankan di anggaran APBD sehingga terlalu memberatkan APBD Kabupaten Purwakarta karena tidak semuanya Pemkab Purwakarta bisa memenuhinya. Maka dari itu anggaran sebagai sumber finansial yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, maka ketersediaan biaya sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan KTP *Online* oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Seperti untuk pengadaan sarana prasarana KTP *Online*. Ketersediaan biaya tersebut dalam pelaksanaannya untuk Berjalannya KTP *Online* akan berguna dan lebih optimal. Tetapi persoalan yang sering dihadapi oleh seluruh Desa-desa adalah masalah keterlambatan pencairan anggaran, Keterlambatan ini bisa dimulai dari keterlambatan pemerintahdaerah mengajukan ke DPRD atau bisa juga keterlambatan pembahasan di DPRD. Hal ini berdampak terhadap terhadap ketersedian sarana dan prasarana dalam menunjang KTP *Online* tersebut.

Proses *Proyeksi* pada peramalan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan ramalan yang memperhatikan masalah didasarkan atas kecenderungan masa lalu tentang pembuatan KTP yang masih manual, yang berbeda dengan masa kini ke masa depan yang telah menggunakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas. Peramalan Kebijakan yang menggunakan teknik ramalan yang didasarkan atas kecenderungan masa lalu tentang pembuatan KTP sebagai kebijakan utama dalam mengelola berjalannya

pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah pada masa kini ke masa depan. Hal ini telah digunakan dalam kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta serta dapat lebih mengetahui permasalahan dari pandangan yang muncul dan akan muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Hasil *Proyeksi* dalam Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik karena telah mempersiapkan sesuatu yang dapat diatasi agar angaran untuk pengembangan teknologi informasi yang ada dilingkungan Kabupaten Purwakarta. Seperti penyediaan sarana dan prasarana *IT* (komputer yang bisa menyimpan data lebih banyak, serta jaringan yang rusak dapat diperbaiki) di semua instansi pemerintahan termasuk desa-desa di dalamnya, serta tidak terlalu di bebankan di anggaran APBD sehingga membutuhkan pengeluaran yang cukup besar pada APBD Kabupaten Purwakarta, karena tidak semuanya Pemerintah Kabupaten bisa memenuhi KTP *Online*.

4.2.2 *Prediksi* dalam Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses *Prediksi* pada peramalan kebijakan berdasarkan pada asumsi teoretik (pemahaman secara teori) yang tegas atau pendapat yang berdasarkan dengan teori sehingga dapat membantu proses peramalan kebijakan dengan cepat. Misalnya dengan mencari informasi mengenai teknologi informasi, sehingga bisa

membantu mengatasi kekurangan pada masalah jaringan dan *sofware* yang terkait dengan kebijakan KTP *Online*. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap pelaksanaan KTP *Online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Memang tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua orang, tetapi yang pasti harus memberikan manfaat atau nilai bagi banyak orang.

Kesulitan-kesulitan untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi dilingkungan badan / instansi tertentu dan diantara sebagian besar badan-badan lain di pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telibat. Masalah koordinasi ini makin runyam jika menyangkut peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya seringkali amat tergantung pada pemerintah daerah. Jika dilihat kondisi yang ada saat ini di sejumlah kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta, baik kabupaten maupun kecamatan, sumber daya manusia yang berlatar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi relatif masih kurang memadai. Sehingga pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya dalam perubahan manajemen, atau lebih dikenal sebagai *change management* yaitu adanya KTP *Online*. Salah satu ciri penting yang dimiliki oleh setiap peraturan perundangan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

Peramalan Kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang lebih mengenali masalah-masalah berdasarkan pada asumsi teoretik yang tegas terhadap pada KTP *Online* sebagai kebijakan utama dalam mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten

Purwakarta. Hal ini dapat lebih mengetahui permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Hasil dari *Prediksi* dalam Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik, karena telah berdasarkan asumsi teoretik (pendapat atau apresiasi secara ilmiah dari masyarakat) terhadap pelaksanaan KTP *Online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Masyarakat memberikan motivasi kepada pemerintah yang berupa, antusiasnya masyarakat pada proses pembuatan KTP *Online* di Desa masing-masing dengan mengikuti pembuatan KTP secara tertib. Adapun proses kericuhan pada pembuftaran pembuatan KTP *Online* di lapangan, hal ini hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak mengharapkan adanya kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sekelompok masyarakat tersebut yakni berasal dari para penentang atas kepemimpinan pada pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Aparatur pemerintahan Kabupaten Purwakarta dapat menggambarkan kebijakan KTP *Online* dari masalah yang ada pada penerimaan kebijakan tersebut terhadap masyarakat sebagai sasaran saat proses pembuatan KTP *Online*. Penerimaan terhadap masyakat Kabupaten Purwakarta atas adanya kebijakan KTP *Online* tersebut menjadi suatu tolak ukur untuk gambaran masa sekarang ke masa depan.

4.2.3 Perkiraan dalam Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Perkiraan dalam peramalan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dengan memperkirakan masalah yang ada pada kondisi dilapangan pada masa depan dan petugas di lapangan apakah bisa mengatasi apabila terjadi kenadala seperti jaringan yang rusak. Teknik ini dapat juga dilakukan dengan memperhatikan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan yang telah menggunakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Hakekat sebuah Peramalan Kebijakan telah dapat diperkirakan secara cepat atau lambat, atau memberi manfaat bagi banyak orang dan menekan risiko seminimal mungkin. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bersungguh-sengguh menjalankan kebijakan KTP *Online* demi memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun hasil dari perkiraan pada peramalan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Yaitu pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat lebih mengetahui permasalahan yang ada pada masa depan, seperti dengan adanya keinginan masyarakat agar bisa mengakses langsung pendaftaran KTP *Online* dimana saja mereka berada. Adapun situasi ,asyarakat pada masa depan dapa lebih mengerti tentang adanya kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Situasi masyarakat pada masa depan berpengaruh terhadap kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta, oleh sebab itu semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kemampuan di

bidang *IT*. Hal tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan pengembangan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta ke KTP *Online* yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Hal ini telah dapat dirasakan sekarang dengan bukti dari situasi masyarakat yang memberikan *respond* yang baik atas kebijakan KTP *Online* ini. Adanya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah Kabupaten Purwakarta maka akan tumbuh juga hubungan kerja sama yang baik antar instansi di Kabupaten Purwakarta.

Kerjasama yang antar instansi dalam mengembangkan kebijakan KTP *Online* untuk lebih memudahkan dalam mencari data, selain itu dengan adanya kerjasama yang baik maka suasana kerja akan lebih baik. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan di Kabupaten Purwakarta. Melihat penjelasan tersebut KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan dengan baik. Karena KTP *Online* digunakan sebagai alat proses pembuatan identitas kependudukan, serta laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati. Sehingga keterlibatan Desa-desa di daerah Kabupaten Purwakarta di dalam KTP *Online* yang bersifat *intern* itu memang dilakukan dengan baik.

Masyarakat sebagai pelaku pendaftar identitas kependudukan yang merasakan langsung atas pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai adminnya. Masyarakat merespon dengan baik atas adanya kebijakan tersebut, oleh sebab itu pemerintahan Kabupaten Purwakarta terus berusaha meningkatkan pelayanan KTP *Online* dengan mengikuti dan mentaati Peraturan daerah yang telah dibuat.

4.3 Rekomendasi kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Rekomendasi kebijakan dalam pembuatan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperhatikan pada penghematan biaya. Hal ini seperti proses pembuatan KTP sebelumnya yang dilakukan di kantor Kecamatan yang menyebabkan masyarakat harus mendatangi sendiri dengan mengguankan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Oleh sebab itu rekomendasi kebijakan lebih menekankan pada proses pembuatan pendaftaran kependudukan agar lebih menghemat biaya yaitu adanya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Adapun proses pada Peramalan Kebijakan yang bersifat efisien oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menghemat biaya juga dengan merekomendasikan salah satu pendapat berdasarkan pemikiran yang telah diperkirakan sebelumnya. Rekomendasi tersebut berkenaan dengan suatu penerapan atau tindakan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi pemerintah Kabupaten Purwakarta di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan sebagai cara untuk memaparkan pendapat terhadap kebijakan KTP *Online*. Hal ini ada pada organisasi, prosedur, dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Maka dari itu alternatif-alternatif atau tindakan yang berkenaan dengan Rekomendasi pemerintah Kabupaten Purwakarta termasuk pada perumusan suatu kebijakan publik. Oleh karena dalam perumusan kebijakan publik di dalamnya

terdapat beberapa alternatif yang dirumuskan baik berupa permasalahan-permasalahan maupun tindakan-tindakan sebagai upaya untuk menanggulanginya. Sehingga dari perumusan kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan atau dimplementasikan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut.

Pengolahan terpadu telah dicapai pada pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta melalui sebuah perencanaan sistem secara menyeluruh. Biasanya sistem dirancang sebagai suatu gabungan beberapa subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta sebagai adminnya. Perancangan sistem ini berupa sebuah komputer pusat besar, atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja beberapa komputer kecil. Gagasan pokoknya pemerintah Kabupaten Purwakarta paduan terencana dari berbagai penerapan yang layak dan efektif. Rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan melakukan langkah-langkah peramalan kebijakan merupakan bagian penting untuk terciptanya sebuah kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menjadi penentuan bagi berjalannya sebuah pemerintahan yang baik, dengan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Mungkin telah menjadi kebiasaan bagi semua instansi atau lembaga dalam melakukan sebuah perumusan untuk sebuah kebijakan.

Adanya hasil Rekomendasi dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini karena dapat mengatasi dalam menghemat biaya, seperti masyarakat hanya datang langsung ke Desa setempat yang mudah diakses jalur darat saja. Hal tersebut

dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat lebih berkembang dengan sendirinya. Merekomendasikan salah satu pendapat berdasarkan pemikiran yang telah diperkirakan sebelumnya yang ada dalam penerapan proses pembuatan KTP *Online*. Faktor yang dapat mempengaruhi pada masyarakat atas adanya kebijakan KTP *Online* yaitu faktor ekonomi, pendidikan seperti pemahan tentang *IT*.

4.3.1 Pengambilan Keputusan Tunggal dalam Rekomendasi kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Pengambilan Keputusan Tunggal oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, yaitu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai pemegang peran utama dalam kebijakan KTP *Online*. Hal ini dapat mempengaruhi orang banyak (aparatur bekerjanya menjadi lebih efisisen dan masyarakat dalam menghemat waktu) terhadap berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Keputusan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang lebih mengenali masalah-masalah dengan memperhatikan pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, dan dapat mempengaruhi orang banyak KTP *Online* sebagai kebijakan utama. Untuk mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Hal ini lebih mengetahui permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Sebelum melakukan pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Purwakarta memperhatikan Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung pada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

ICT saat ini telah menjadi sumber daya utama untuk memperbaiki pelayanan pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap masyarakat. Serta mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era informasi ini. Sarana dan prasarana sangat diperlukan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan KTP *Online* tersebut. Dalam hal sumber dayanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten selaku admin dalam sistem tersebut selalu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kuliatas pelayanan dalam penggunaan KTP *Online* tersebut.

Hasil Pengambilan Keputusan Tunggal dalam Rekomendasi kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik dapat diatasi dalam pengambilan pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja. Yaitu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai pemegang peran utama dalam kebijakan KTP *Online*. Hal ini masyarakat sebagai sasaran yang utama dalam

pelaksanaan kebijakan pembuatan KTP *Online* adalah terbentuknya basis data yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Sehingga tidak ada penggandaan data identitas masyarakat yang selama ini menjadi masalah penting dalam melaksanakan tugas kependudukan. Kemudian adanya transparansi laporan setiap SKPD dalam hal kegiatan yang dilakukan setiap SKPD dan bupati selaku pimpinan dapat melihat data tersebut. Dan di setiap Desa-desa di Kabupten Purwakarta bahwa basis data telah terbentuk karena adanya KTP *Online* tersebut.

Pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM telah mengambil pada penjurusan industri dan organisasi. Demi terciptanya suatu kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta bisa berjalan dengan baik.

4.3.2 Kepastian dalam Rekomendasi kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses pengambilan kepastian pada rekomendasi kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah menjadi pilihan yang diketahui dengan pasti pada pelaksanaannya di lapangan, seperti masyarakat dapat mendaftarkan identitas dirinya langsung ke kantor Desa setempat. Rekomendasi kebijakan yang bersifat efisien yaitu dengan kepastian pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diutamakan, sehingga dengan merekomendasikan salah satu pendapat berdasarkan pemikiran yang telah diperkirakan sebelumnya dapat dengan pasti. Secara *internal*

sistem yang ada tentang produk yang KTP *Online* telah dihasilkan dan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

Penggunaan teknologi informasi sebagai rekomendasi pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas, efisiensi atau kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Betapapun teknologi informasi memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasikan dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, KTP *Online* juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari.

Untuk memastikan keberhasilan KTP *Online* Kabupaten Purwakarta, maka personil bagian manajemen data harus membuktikan bahwa mereka mampu mengurus data *output* dan *input* yang telah dipercayakan kepada mereka, karena kualitas data merupakan priorotas utama pada KTP *Online* dan dengan memasukkan data dengan kualitas data yang baik. Kualitas data dapat ditingkatkan dengan menjaga integritas dan keamanan data.

Menjaga keamanan data memang sangat dibutuhkan pemerintah Kabupaten Purwakarta hal ini dikarenakan data tersebut menyangkut data yang sifatnya *intern*. Dengan demikian diperlukan antisipasi untuk menjaga agar data tersebut aman. Hal yang dilakukan dengan menyimpan rapih data tersebut ke dalam sebuah tempat yang dianggap aman dan tidak diketahui orang banyak.

Adapun hasil dari Kepastian dalam Rekomendasi kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mempersiapkan sesuatu yang dapat diatasi, seperti kepastian akan adanya saran prasarana (komputer, *sofware,* jaringan yang bagus ke setiap desa) sehingga kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta menjadi pilihan yang diketahui dengan pasti, serta tentang produk kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dihasilkan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia terhadap berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta secara *intern* di Desa-desa wilayah Kabupaten Purwakarta.

4.3.3 Kecepatan dalam Rekomendasi kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses untuk mengetahui kecepatan sikap pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam bertindak untuk mengatasi masalah, seperti adanya petugas desa yang sakit dengan adanya petugas lain yang menguasai bidang *IT*. Sehingga masalah yang terjadi pada pelaksanaan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta bisa diatasi dengan tindakan yang secepatnya. Banyak hal dalam kebijakan KTP *Online* Kabupaten Purwakarta dengan salah satunya yaitu dengan memperhatikan kecepatan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai admin dalam menjalankan KTP *Online*.

Rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bersifat membutuhkan kecakapan dalam menganalisis kebijakan dengan kecepatan sikap yang diutamakan, sehingga dengan merekomendasikan salah satu pendapat berdasarkan pemikiran yang telah diperkirakan sebelumnya dapat dengan cepat dan tepat. Melalui *ICT*, masyarakat juga telah merasakan manfaatnya akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Tampak bahwa konsep pengembangan *ICT* sangat erat kaitannya dengan konsep keterbukaan atau transparansi. Pada umumnya kebijakan KTP *Online* menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang biasanya di dalam masyarakat maka kurangnya transparansi akan mengakibatkan ketimpangan informasi.

Hasil dari kecepatan dalam rekomendasi kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yaitu telah berjalan dengan baik. Hal ini di karena kan ketanggapan atau kecepatan dalam menangani masalah mengenai hambatan atau kendala, seperti adanya petugas desa yang mendadak berhalangan dalam tugas melayani masyarakat, maka dapat diatasi dengan adanya petugas lain yang menguasai *IT* sesama aparatur desa tersebut, sehingga dalam penerapan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta tidak mengalami kesuliatan. Adanya kecepatan dalam rekomendasi kebijakan maka pemerintah mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses pelayanan oleh pemerintah lebih partisipatif dan mekanisme pengawasan baik

internal maupun *eksternal* akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktek KKN.

4.4 Pemantauan kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang telah diberikan kepada para pejabat dilapangan. Data yang baik memberikan informasi yang baik, dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas pula seperti yang terjadi pada KTP *Online*. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menentukan data tersebut berkualitas atau tidak maka dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap pada KTP *Online*. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program KTP *Online* pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Proses Pemantauan kebijakan pada kebijakan KTP *Online* yang berdasarkan pada anggapan, seperti diambil dalam pemahaman sebelumnya tentang data kependudukan yang sering terjadi penggandaan identitas kependududkan. Hal ini disebabkan dengan adanya kesalahan memasukan data yang di karenakan data yang sudah terdaftar ikut tercampur dengan data yang

sudah terdaftar sebelumnya (formulir pendaftaran). Adanya integrasi antara data dan pengolahan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten Purwakarta bahwa integrasi data dicapai melalui "data *based*". Pada sebuah sistem pengolahan informasi, "data *based*" terdiri dari semua data yang dapat dijangkau oleh sistem. Pada *ICT* berdasarkan komputer, istilah "data *based*" telah dipakai khusus untuk data yang dapat dijangkau secara langsung oleh komputer. Manajemen sebuah "data *based*" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adanya sebuah sistem perangkat lunak komputer yang disebut sebagai sebuah sistem manajemen "data *based*". KTP *Online* pemerintah Kabupaten Purwakarta mamakai sebuah item (butir) data akan mengambil *item* data yang sama, yang hanya sekali disimpan dan disediakan untuk semua penerapan. Suatu peremajaan dari sebuah item data membuatnya sesuai untuk semua pemakaian.

Pemantauan kebijakan dalam pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta pemahaman yang diambil dalam pemahaman sebelumnya. Pemantauan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Masalah-masalah publik ada yang mudah dikendalikan, dan ada yang sulit dikendalikan dengan melihat hasil kebijakan KTP *Online*. Tingkat kesulitan masalah-masalah pada perumusan kebijakan ditentukan oleh kepatuhan sikap, pemeriksaan kegiatan, akuntansi kegiatan dan *eksplanasi*. Kemampuan untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta mengembangkan pemikiran pada perumusan masalah seperti peningkatan

pelayanan terhadap masyarakat dengan baik melalaui kebijakan-kebijakan untuk peningkatannya.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dalam mengembangkan KTP *Online*. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selalu melakukan pelatihan baik itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sendiri ataupun di Kecamatan dan Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Pemahaman prinsip sebab akibat dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri, dan perkembangan teknologi menjadi penentu dalam sebuah kebijakan. Adapun Pemantauan Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :

Adapun hasil dari pemantauan kebijakan KTP *Online* dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yakni telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku admin tersebut selalu melakukan pemantauan ke setiap Desa-desa, seperti pengecekan identitas penduduk yang sudah terdaftar sehingga identitas penduduk tidak ada yang berganda. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sedang melakukan revisi terhadap KTP *Online* tersebut supaya masyarakat dapat menggunakan KTP *Online* untuk keperluannya.

4.4.1 Kepatuhan sikap dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses dalam mengetahui kepatuhan sikap, pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menentukan apakah tindakan para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, seperti Peraturan Daerah tentang administrasi Pelayanan Kependudukan terhadap masyarakat. Pemantauan kebijakan telah menentukan apakah tindakan para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan dapat mempengaruhi standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator pada pelaksanaan KTP *Online* sebagai kebijakan utama. Untuk mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Sebuah pengembangan pemerintahan yang dapat lebih mengetahui permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

Kepatuhan sikap pelaksanaan kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, maka tahapan terakhir dari proses kebijakan telah melakukan proses kebijakan dengan baik. Kepatuhan sikap menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan KTP *Online* Kabupaten Purwakarta tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri.

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu yang menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena mencapai hasil implementasi kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta setiap program membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan. KTP *Online* telah dijadikan alat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya tetang identitas kependudukan secara cepat. Dengan adanya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta maka masyarakat akan selalu bisa menilai kinerja pemerintah. Apabila ada kelalaian ataupun kesalahan dapat di perbaiki oleh pemerintah.

Hasil yang terkait dengan kepatuhan sikap dalam pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan atas kepatusan sikap aparatur yang terkait dengan berjalannya KTP *Online* dan sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, seperti tidak melanggar peraturan daerah Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan. Serta menekankan pada pencapaian tujuan sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri terhadap berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

4.4.2 Pemeriksaan Kegiatan dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Pemeriksaan kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menentukan sumber daya dan pelayanan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran (masyarakat) serta sumber daya manusia yang mendukung penerapan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Serta mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dapat lebih mengetahui permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Semakin beragam perilaku pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak. Hal ini perlunya Pemeriksaan kegiatan yang harus ditujukan kepada para pejabat dilapangan. Data yang baik akan memberikan informasi yang baik.

Adanya data yang berkualitas sangat membantu dalam pemeriksanaan kegiatan yang berakibat pada informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga pula. Semua permasalahan pemerintahan Kabupaten Purwakarta ini juga berurat dan berakar pada politik, adalah suatu hal yang wajar apabila temuan-temuan para aktor di lapangan baru dipakai dalam proses-proses, dengannya para politisi memutuskan apa yang akan dilakukan kemudian. Oleh karena itu sebuah pandangan tentang pemeriksaan kegiatan yang lebih komperhensif telah ditekankan, melebihi pandangan yang hanya terbatas pada ilmu pengetahuan

dalam mengukur dampak-dampak programatis. Dalam proses kebijakan telah menilai perlunya penekanan terhadap konteks pemeriksaan kegiatan yang lebih luas.

Pemeriksaan kegiatan mudah atau tidaknya masalah dikendalikan dan yang selalu menghambat suatu proses pembangunan dengan masalah ketersediaan anggaran, terbatasnya anggaran menjadi permasalahan klasik dalam suatu pemerintahan, apabila anggaran tidak ada maka proses pembangunan tidak akan berjalan. Kemampuan instansi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyediakan teknologi yang baik bisa juga mempengaruhi dalam proses implementasi KTP *Online* tersebut karena setiap instansis memiliki kecanggihan teknologi yang berbeda-beda.

Pemeriksaan pada kemampuan instansi di Kabupaten Purwkarta yang terkait dengan KTP *Online* dalam menyediakan teknologi yang memadai. Lembaga-lembaga atasan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Hal ini dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama. Dan yang berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undangundang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioitas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

Hasil dari Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Karena dapat mengetahui apakah tindakan para aparatur dalam menentukan sumber daya manusia seperti banyaknya masyarakat yang lulusan perguruan tinggi serta dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Serta menekankan pada memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan.

4.4.3 Akuntansi kegiatan *monitoring* dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses pada Akuntansi kegiatan *monitoring* yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi (informasi berdasarkan hitungan) seperti pengaruh adanya kebijakan KTP *Online* terhadap peningkatan ekonomi pada masyarakat. Mengakibatkan tingkat perubahan sosial dan ekonomi setelah diterapkannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dilakukan secara sesuai dengan prosedur pada KTP *Online* Kabupaten Purwakarta yaitu pemantauan kebijakan yang bersifat *monitoring* dalam menganalisis kebijakan dengan kecepatan sikap yang diutamakan. Sehingga dengan memperhatikan perubahan sosial setelah adanya kebijakan KTP *Online* tersebut dan ekonomi masyarakat, serta dapat lebih

mengetahui permasalahan yang muncul dalam berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

KTP *Online* adalah kumpulan hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di wilayah Kabupaten Purwakarta yang dihasilkan dari kerjasama SKPD Kab/Kec sampai dengan Kel / Desa dan sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan identitas kependudukan. Hal ini merupakan suatu inovasi bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penerapan *ICT* untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal yang diperhatikan dalam pembangunan *ICT* di Kabupaten Purwakarta dimana saja pasti tidak akan terlepas dari adanya sumber dana, menjadi sesuatu yang vital karena secanggih ataupun sehebat apapun sistem tersebut tidak akan terbangun bila tidak ada sumber dana yang memadai. Besarnya dana untuk pembuatan suatu sistem informasi akan sulit untuk diketahui kerena sistem informasi di bangun dari berbagai jenis mulai dari jaringan, *software*, maupun *hardware* semua komponen tersebut yang menjadi bahan utama dalam pembuatan KTP *Online*. Ditambah bahan yang diperluakan dalam pembuatan *ICT* masih mengimpor dari luar karena bahan yang diperlukan belum tersedia di dalam negeri sehingga dana yang diperlukan dalam membangun *ICT* akan memakan banyak dana. seperti untuk pengadaan sarana prasarana dalam KTP *Online*. Ketersediaan biaya tersebut dalam pelaksanaannya untuk Berjalannya KTP *Online* akan berguna dan lebih optimal. Tetapi persoalan yang sering dihadapi oleh seluruh SKPD adalah masalah keterlambatan pencairan anggaran, Keterlambatan ini bisa

dimulai dari keterlambatan pemerintahdaerah mengajukan ke DPRD atau bisa juga keterlambatan pembahasan di DPRD. Hal ini berdampak terhadap terhadap ketersedian sarana dan prasarana dalam menunjang KTP *Online* tersebut.

Adanya hasil dari Akuntansi kegiatan *monitoring* dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik karena pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat melakukan sebuah akuntansi (mencari informasi berdasarkan rincian peluang), seperti pemahaman masyarakat terhadap *IT* yang berpengaruh terhadap adanya kebijakan KTP *Online* atas perubahan sosial dan ekonomi, setelah diterapkannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Adapun keterkaitan Akuntansi kegiatan *monitoring* telah menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi setelah diterapkannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Serta banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas berjalannya KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta secara *intern* di Desa-desa wilayah Kabupaten Purwakarta.

4.4.4 *Ekplanasi* dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses *Ekplanasi* yang dilakukan dalam pemantauan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengumpulkan informasi tentang KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta serta dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Misalnya dengan membandingkan

kebijakan KTP *Online* di Kabupaten lain dengan kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yang bersifat *Intern* di Desa-desa dan lebih bertujuan dalam pelayanan terhdapat masyarakat berdasarkan pendaftaran kependudukan. Informasi yang dikumpulkan berupa informasi dari media cetak, media masa serta dari masyarakat lansung yang berkaitan dengan kebijakan KTP *Online*. Serta menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda sumberdaya dan pelayanan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Untuk mengelola berjalannya pengembangan pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah di Kabupaten Purwakarta.

Pada bahasannya kegiatan, tujuan kebijakan serta metode *Ekplanasi* program telah melakukan suatu upaya khusus untuk menggambarkan bentuk di mana penilaian-penilaian dibuat terhadap program yang tengah berjalan serta teknik ilmiah terbaru dan *Ekplanasi*. Yang belakangan ini dikaitkan dengan suatu profesi baru yang salah satunya berpegangan pada jurnal, pada buku baru pegangan, bahasa, dan Kabupaten Purwakarta. Terciptanya suatu profesi tidak lantas mengakkan banyak permasalahan yang telah menjadi karakteristik dari *Ekplanasi* program yang efektif. Kesadaran bahwa menggabungkan dan membandingan informasi dari sumber-sumber yang berbeda-beda secara manual itu sulit, dan karena itu memakan waktu banyak. Kebutuhan waktu banyak ini sering menjadi kendala bagi para pengambil kebijakan dan pembuat keputusan, karena tindakan harus ditetapkan dalam waktu singkat. Disamping itu penyimpanan data dalam bentuk yang tidak sempurna, dalam artian data tidak dapat disusun dan dianalisis ulang untuk pelayanan yang baik.

Adapun hasil dari *Ekplanasi* dalam Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik karena dapat mengumpulkan informasi tentang KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik (pelayanan terhadap masyarakat sepeti KTP *Online*) dan program berbeda yang dapat berpengaruh terhadap KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. Misalnya seperti adanya program penyuluhan seperti pemahaman dalam *IT* yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta ke setiap Desa-desa yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Purwakarta.

4.5 Penilaian kebijakan dalam analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses Penialaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam analisis kebijakan pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta yaitu penilaian yang sesuai dengan harapan yang benar-benar dihasilkan. Misalnya harapan pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap adanya kebijakan KTP *Online* yang bisa berjalan dengan baik, serta dapat digunakan dalam melayani masyarakat. Proses penilaian juga dapat didasarkan pada kepuasan masyarakat atas adanya kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta, serta kondisi dilapangan dalanm pelayanan terhadap masyarakatnya. Penialaian kebijakan telah menjadi bagian penting untuk terciptanya sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Mungkin

telah menjadi kebiasaan bagi semua instansi atau lembaga dalam melakukan sebuah penialaian untuk sebuah kebijakan.

Penialaian kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Penialaian kebijakan telah diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari Penialaian kebijakan tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. Fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekuranagn tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang. Pengolahan terpadu dapat dicapai melalui sebuah perencanaan sistem secara menyeluruh di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sistem yang dirancang sebagai suatu gabungan beberapa subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal. Perancangan sistem ini dapat berupa sebuah komputer pusat besar, atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja beberapa komputer kecil. Gagasan pokoknya telah dijadikan paduan terencana dari berbagai penerapan yang layak dan efektif oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Secara jelas bahwa suatu organisasi pemerintah Kabupaten Purwakarta dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada KTP *Online*, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak.

Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut secara *eksternal* dapat mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara internal informasi tentang produk KTP *Online* yang telah dihasilkan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengatur pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat dilapangan. Data yang baik telah memberikan informasi yang baik. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang telah dihasilkan lebih berkualitas juga pula. Dalam menentukan data tersebut berkualitas atau tidak maka pemerintah Kabupaten Purwakarta melihat dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap. Mengingat adanya perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Penialaian kebijakan yang hendak dicapai oleh pembuatan KTP *Online* kepada publik di Kabupaten Purwakarta yang dapat menambah pengetahuan yang *relevan* dengan harapan yang benar-benar dihasilkan dari kebijakan yang mempersoalkan masalah-masalah yang mendasari dan memasuki proses.

Adapun hasil dari Penialaian kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependududkan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta yaitu

telah berjalan dengan baik proses pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta**.** Yang dikarenakan masyarakat telah bisa menerima akan kebijakan KTP *Online* yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Hal ini disebabkan pelayanan terhadap masyarakat dalam KTP *Online* Kabupaten Purwakarta selalu berjalan dengan baik. Adapun masalah-masalah yang dapat diatasi dalam pelaksanaan KTP *Online* seperti masalah jaringan, komputer, petugas Desa yang menangani KTP *Online* dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta.

4.5.1 Evaluasi Semu dalam Penilaian kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Pada Proses Evaluasi Semu pemerintah Kabupaten Purwakarta mencari informasi yang *valid* seperti hala-hal yang dapat menghambat berjalannya kebijakan KTP *Online* yaitu adanya m,asyarakat yang kurang memahami akan adanya kebijakan KTP *Online*. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang *valid* juga dan dapat dipercaya sesuai tujuan mengenai hasil kebijakan penerapan KTP *Online*. Penialaian kebijakan telah menjadi bagian penting untuk terciptanya sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memperhatikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan penerapan KTP *Online* karena menjadi harapan yang benar-benar dihasilkan pemerintah yang baik. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang

berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, pada tataran dasar hukum, evaluasi telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan segala bidang dan harus selalu dilaksanakan dengan baik. Pada tata operasional, sejumlah aspek patut mendapat perhatian dengan baik pula. Beberapa hal operasional penting pada prose evaluasi semu yang berkaitan dengan berjalannya KTP *Online* Kabupaten Purwakarta. adalah :

a. Evaluasi pada kinerja yang mencari informasi yang *valid*, meliputi hasil, manfaat dan dampaknya dari KTP *Online* Kabupaten Purwakarta..
b. Evaluasi pada kinerja sebagai proses pemerintah Kabupaten Purwakarta. yang melekat pada proses pembuatan KTP *Online*.

Adapun hasil dari evaluasi semu dalam penilaian kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan semua aparatur Desa yang ada di Kabupaten Purwakarta memberikan pemahaman tentang kebjiakan KTP *Online* dari sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai hasil penilaian kebijakan dimana dapat menghasilkan informasi yang *valid,* seperti sebagian besar masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat memahami kebijakan tersebut dan telah melaksanakan pendaftaran identitas kependudukan melalui KTP *Online*. Adanya pemahaman tentang KTP *Online* oleh masyarakat

meliputi dampak dan sebab, seperti masyarakat bisa lebih cepat dalam pendaftaran identitas kependudukan yang hanya membutuhkan 10 menit di desa setempat.

4.5.2 Evaluasi *Formal* dalam Penialaian kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Proses pada Evaluasi *Formal* oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan secara cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, melihat kondisi dilapangan secara langsung dalam proses pelaksanaan KTP *Online* dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dengan mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan KTP *Online* yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai administrator program. KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan. Penialaian kebijakan telah menjadi bagian penting untuk menghasilkan informasi *valid* dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, dengan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Mungkin telah menjadi kebiasaan bagi semua instansi atau lembaga dalam melakukan sebuah Penialaian untuk sebuah kebijakan.

Telah diperhatikan dalam proses kebijakan publik dengan evaluasi dan dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dengan rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang tengah atau telah dilaksanakan. Terdapat tiga hal yang telah diperhatikan dalam melaksanakan

evaluasi kebijakan secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang *valid* tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek *instrument* (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan *instrument* pemerintahan Kabupten Purwakarta tersebut.

Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kebermanfaatan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada bagian ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada subtansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di pemerintahan Kabupten Purwakarta. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adanya tujuan telah tercapai tetapi maslah tidak terselesaikan. Hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan KTP *Online* pemerintahan Kabupten Purwakarta. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Untuk memastikan keberhasilan suatu sistem manajemen data, personil manajemen data telah membuktikan bahwa mereka mampu mengurus data yang telah dipercayakan kepada mereka., karena kualitas data merupakan prioritas utama KTP *Online* dan dengan memasukkan data dengan kualitas data yang baik.

Kualitas penyimpanan data telah ditingkatkan dengan menjaga integritas dan keamanan data yang termasuk telah diperhatikan dalam Evaluasi *Formal*. Menjaga keamanan data memang sangat dibutuhkan hal ini di karenakan data tersebut menyangkut data yang sifatnya *intern*. Dengan demikian adanya antisipasi pemerintahan Kabupten Purwakarta untuk menjaga agar data tersebut aman. Hal yang dilakukan biasanya dengan menyimpan rapih data tersebut ke dalam sebuah tempat yang dianggap aman dan tidak diketahui orang banyak.

Hasil dari Evaluasi *Formal* dalam Penilaian kebijakan pada analisis kebijakan KTP *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bahwa pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik, karena dengan menilai aspek *instrument* (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan *instrument* tersebut. Misalnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan KTP *Online* sebagai kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta telah berusaha dengan evaluasi kebijakan dalam menilai kebermanfaatan tujuan atau target dengan masalah seperti adanya masyarakat yang kurang percaya dengan penerapan KTP *Online*. Hal ini dapat diatasi dengan mensosialisasiakan KTP *Online* ke semua Desa-desa di Kabupaten Purwakarta agar kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemrintah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik.